

## ABSTRAK

Pertambangan merupakan sektor usaha yang sangat menguntungkan bagi para pelaku usahanya, sehingga banyak pelaku usaha yang mengeluti bidang tersebut perseorangan maupun badan hukum. Sehingga aturan untuk melakukan ijin usaha pertambangan diterapkan oleh pemerintah guna menanggulangi adanya kerusakan lingkungan. Sanksi pidana juga dihadapkan bagi para pelaku usaha pertambangan. Aturan pidana diterapkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 pada pasal 153 hingga pasal 162, dimana aturan pidana tersebut banyak meliputi kegiatan yang berdasarkan pada izin pertambangan. Aturan dibuat tidak hanya untuk perseorangan (*natuurlijk person*) tapi juga badan hukum (*rechts persoon*). Korporasi merupakan badan hukum yang memiliki entitas hukum yang berbeda dalam bentuk pertanggungjawabannya, namun sudah banyak teori yang mendukung bahwa pertanggungjawaban korporasi dapat dibebankan kepada korporasi, bahkan sudah ada aturan yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum, akan tetapi dalam praktiknya jarang korporasi ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.

**Kata Kunci :** pertanggungjawaban pidana, korporasi, pertambangan